



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi dimaksud untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis sumber daya alam Kabupaten Batu Bara. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui pencapaian manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dalam hal mempertanggung jawabkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diembannya kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara serta fungsi pengawasan instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Dalam Laporan Kinerja tahun 2025 ini disajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara yang diamanatkan oleh Bupati Batu Bara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas beserta seluruh pejabat dan staf Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan optimalisasi tugas dalam pembiayaan pembangunan daerah



sesuai dengan visi yang ditetapkan dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja.
4. Dalam pencapaian sasaran Strategis yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran belum berhasil diwujudkan secara optimal. Kekurang berhasil dari beberapa sasaran lebih disebabkan pada ketidakjelasan peraturan yang melandasinya maupun pada adanya perubahan kondisi di lapangan dari kondisi yang telah diperhitungkan dalam proses perencanaan.
5. Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat *outcome*. Penyebabnya adalah organisasi belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
6. Organisasi telah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran dengan membedakan jenis anggaran. Hal ini disebabkan sistem keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 tahun 2020 yang peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yang mencakup akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata mudah – mudahan laporan ini, bisa bermanfaat untuk kita semua.

Perupuk, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batu Bara

WALI WALA AZAHARI SAGALA, S. Pd, M.H
Pembina
NIP. 19770415 201001 1 013



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.5. Core Area dan Isu-isu Strategis	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Perencanaan Strategis.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2. Realisasasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	52



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Hubungan Visi dan Misi Bupati Dengan Tujuan dan Sasaran.....	15
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	17
Tabel 3.1. Teknik pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 3.2. Skala Nilai peringkat Kinerja.....	25
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	26
Tabel 3.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama	29
Tabel 3.5. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan	32
Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	36
Tabel 3.7. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	37
Tabel 3.8. Presentase guru SD/MI yang memiliki kualifikasi D4/S1	38
Tabel 3.9. Presentase guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4/S1.....	39
Tabel 3.10. Capaian Sasaran Strategis Terpeliharanya Seni Budaya Asli Daerah	40
Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2025.....	41
Tabel 3.12. Efektifitas Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran 1.....	45
Tabel 3.13. Efektifitas Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran 2	48
Tabel 3.14. Efektifitas Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran 3.....	49
Tabel 3.15. Efektifitas Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran 4	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :



1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Menjadi bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
5. Menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
6. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
7. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pembangunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilandasi beberapa dasar hukum, antara lain :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi atas Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan tahun 2023 dalam upaya memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya; dan
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor : 07 Tahun 2016, tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menyebutkan bahwa tugas Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bidang Pendidikan PAUD dan Non Formal (PPNF), Bidang Pembinaan Ketenagaan (PTK) yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan kurikulum, pengadaan sarana prasarana pendidikan, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, dan pembinaan tenaga fungsional/tenaga kependidikan lainnya, serta merumuskan Kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan menyusun langkah–langkah dan Program Kerja sebagai berikut :

1. Pembinaan Sekolah Dasar (SD).

- a. Upaya pemerataan pendidikan sekolah dasar akan dilaksanakan, dengan kegiatan-kegiatan:
- Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru untuk jenjang Pendidikan SD.
 - Membangun Unit Sekolah Baru jenjang SD.
 - Memberikan subsidi pendidikan dalam bentuk Imbal swadaya/blockgrant bagi SD Negeri dan Swasta, agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas.
 - Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan sekolah dasar agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai.
 - Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu dengan mempertimbangkan peserta didik laki-laki dan perempuan secara proporsional.
- b. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar.
- Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah.
 - Pembangunan SD Percontohan.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
 - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif.
 - Penyelenggaraan supervisi terhadap seluruh aspek kegiatan SD.
 - Melaksanakan berbagai kegiatan lomba bagi siswa maupun tenaga edukatif, baik lomba bidang studi, ketrampilan siswa, lomba karya ilmiah dlsb.



c. Upaya memperbaiki Manajemen Bidang Pembinaan Pendidikan SD

- Melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan sekolah dasar.
- Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata.
- Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan.
- Merintis pembentukan Badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah.

2. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

a. Upaya pemerataan pendidikan sekolah menengah pertama akan dilaksanakan, dengan kegiatan-kegiatan:

- Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru untuk jenjang Pendidikan SMP.
- Membangun Unit Sekolah Baru jenjang SMP.
- Memberikan subsidi pendidikan dalam bentuk Imbal swadaya/blockgrant bagi SMP Negeri dan Swasta, agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas.
- Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan sekolah dasar agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai.
- Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu dengan mempertimbangkan peserta didik laki-laki dan perempuan secara proporsional.

b. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah.
- Pembangunan SMP Percontohan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu sekolah, penilaian proses dan hasil belajar secara bertahap dan berkelanjutan, serta pengembangan sistem dan alat ukur penilaian pendidikan yang lebih efektif.
 - Penyelenggaraan supervisi terhadap seluruh aspek kegiatan SMP.
 - Melaksanakan berbagai kegiatan lomba bagi siswa maupun tenaga edukatif, baik lomba bidang studi, ketrampilan siswa, lomba karya ilmiah dlsb.
- c. Upaya memperbaiki Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Melaksanakan desentralisasi Bidang Pembinaan Pendidikan SMP.
 - Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - Mengembangkan sistem akreditasi secara adil dan merata.
 - Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan.
 - Merintis pembentukan Badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah.

3. Pendidikan PAUD dan Non Formal (PPNF).

- a. Upaya untuk perluasan dan pemerataan Pendidikan PAUD dan Non Formal:
- Perluasan pemerataan dan jangkauan Pendidikan taman kanak-kanak dan Anak Dini Usia.
 - Melakukan pemerataan Taman Kanak-Kanak melalui Partisipasi Masyarakat.
 - Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak satu atap dengan SD/MI.
 - Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan kualitas pelayanan Kejar Paket A Setara SD dan Paket B setara SLTP.
 - Penuntasan Buta Aksara melalui Program Keaksaraan Fungsional terutama bagi penduduk Buta Aksara usia 10 - 44 Tahun.
 - Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan.
- b. Upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan.
- Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan PAUD.



- Meningkatkan mutu sarana prasarana yang dapat memperluas pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar.
 - Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu yang dilakukan melalui penetapan standar kompetensi, pengembangan standarisasi.
 - Meningkatkan kemitraan dengan pihak yang berkepentingan (Stake holder).
 - Melaksanakan penelitian kesesuaian program-program PPNF.
- c. Upaya peningkatan manajemen Pendidikan PAUD dan Non Formal.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
 - Pembinaan kelembagaan Pendidikan Non Formal.
 - Pemanfaatan potensi masyarakat.
 - Mengembangkan komunikasi dan informasi di bidang Pendidikan Non Formal.

4. Pembinaan Ketenagaan.

- b. Upaya untuk perluasan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan dasar, pendidikan Luar Sekolah :
- Perluasan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal,
 - Perluasan kebutuhan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - Menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- c. Upaya peningkatan kualitas dan relevansi tenaga pendidik dan kependidikan.
- Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesionalise Guru, Kepala Sekolah, Pengawas sekolah secara merata.
 - Meningkatkan kemampuan profesionalisme Instruktur melalui kegiatan TOT, Lokakarya.
 - Pengembangan kompetensi, program sertifikasi, peningkatan kualifikasi pendidikan Tutor PAUD, guru TK, SD dan SMP

- d. Upaya peningkatan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan dasar, pendidikan Luar Sekolah.
- Mengembangkan sistem insentif guru berprestasi untuk mendorong kompetisi yang sehat.
 - Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi, program sertifikasi, peningkatan kualifikasi pendidikan Tutor PAUD, guru TK, SD dan SMP
 - Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - Penyiapan Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Guru TK, SD dan SMP, SLB, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Formal dan Non Formal;

1.4.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor : 07 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menyebutkan bahwa tugas Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b), Kepala Dinas dibantu seorang Sekretaris (Eselon III A,) 4 orang pejabat struktural eselon III B, dan 7 orang pejabat struktural eselon IV A dan 2 orang pejabat Substansi yaitu:

1. **SEKRETARIS**, membawahi 3 sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Substansi Keuangan Dan Barang Milik Daerah
 - c. Substansi Program
2. **BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**, membawahi 2 seksi :
 - a. Seksi Kurikulum Dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Sarpras Pendidikan Sekolah Dasar



3. **BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**, membawahi 2 seksi :
 - a. Seksi Kurikulum Dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Sarpras Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4. **BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**, membawahi 2 seksi:
 - a. Seksi Kurikulum Dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Sarpras PAUD
5. **BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**, membawahi 2 seksi:
 - a. Seksi PTK Pendidikan Dasar
 - b. Seksi PTK PAUD Dan Pendidikan Non Formal

Disamping jabatan struktural diatas dalam usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kependidikan di Kabupaten Batu Bara, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dibantu oleh, Penilik TK/PAUD Dan Pengawas SD/SMP.

1.5. Core Area dan Isu-isu Strategis

Core Area adalah karakteristik khusus atau sasaran utama yang ingin dicapai suatu instansi pemerintah, yang dicerminkan oleh peran instansi pemerintah tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya. **Core Area** dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut adalah :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Pemerataan dan Perluasan Kesempatan memperoleh Pendidikan
3. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
4. Peningkatan Manajemen Pendidikan.

Isu-isu strategis adalah sesuatu yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yaitu:

1. Meningkatkan Angka partisipasi kasar dan murni pada setiap jenjang pendidikan;
2. Meningkatkan nilai hasil belajar siswa khususnya nilai ujian akhir sekolah / nasional;
3. Terwujudnya hubungan antara lingkungan sekolah (Khususnya alam sekitar) dengan tuntutan pendidikan akibat adanya kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan masyarakat;
4. Meningkatkan rasa saling menghargai diantara masyarakat (Khususnya usia sekolah) akibat peningkatan aktifitas keagamaan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
5. Meningkatkan angka/persentase guru yang berkelayakan sekaligus menurunnya angka indiscipliner guru / tenaga kependidikan.
6. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran belum terpenuhi sesuai standar sarana prasarana pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum Dinas dengan penekanan pada aspek strategis Dinas serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Dinas.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara telah menetapkan visi pembangunan yaitu; *“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya”*. Sedangkan visi tersebut dituangkan ke dalam 8 (delapan) misi, dimana Dinas Dinas Pendidikan mengacu pada misi sebagai berikut :

- a. Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Inovatif dan Berbudaya;
- b. Misi 7 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan kedua misi diatas ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan ini didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sementara itu, untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis ini adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Adapun hubungan antara visi dan misi Bupati Batu Bara dengan rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara disajikan dalam gambar berikut ini :

Tabel 2.1. Tabel Hubungan Visi dan Misi Bupati Dengan Tujuan dan Sasaran

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya	Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Inovatif dan Berbudaya.	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
			Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. PK berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi dan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 - 2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Angka Melek Huruf pada Usia 15-24 Tahun	%	100
		2	Angka lulusan (AL) SD/MI/PAKET A	%	100
		3	Angka lulusan (AL) SMP/MTs/PAKET B	%	100
		4	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,2
		5	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,3
		6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,45
		7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	97,50
		8	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	42,90
		9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	117
		10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	107,60
		11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	104
		12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90,55
		13	Angka melanjutkan sekolah dari non formal ke SD	%	100
		14	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
		15	Angka Kemampuan Literasi SD	Nilai	64,79
		16	Angka Kemampuan Literasi SMP	Nilai	59,42
		17	Angka Kemampuan Numerasi SD	Nilai	65,23
		18	Angka Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	61,04
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP		Nilai	BB (78,50)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.



Tabel 3.1. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan				
1.1	Angka melek Huruf pada Usia 15 - 24 Tahun	Kualitatif	Jumlah penduduk melek huruf usia 15-24 tahun / Jumlah penduduk usia 15-24 tahun x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pendidikan Dasar	Kualitatif	{Jumlah (Lulusan Ix6) + (Lulusan IIx7)} / {Jumlah (Lulusan I) + (Lulusan II)}	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
1.3	Angka lulusan (AL) SD/MI/PAKET A	Kualitatif	Jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI/Paket A dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI/Paket A pada tahun sebelumnya	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
1.4	Angka lulusan (AL) SMP/MTs/PAKET B	Kualitatif	Jumlah Lulusan pada jenjang SMP/MTs/Paket B dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun sebelumnya	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	Kualitatif	(Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring



No	Indikator Kinerja Utama	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	Kualitatif	(Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kualitatif	(Jumlah seluruh siswa PAUD/TK/RA / Jumlah penduduk usia 4 - 6 tahun) x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Kualitatif	(Jumlah seluruh siswa SD/MI / Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun) x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	Kualitatif	(Jumlah seluruh siswa SMP/MTs / Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun) x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Kualitatif	(Jumlah siswa usia sekolah 7 - 12 tahun jenjang SD/MI / Jumlah Penduduk usia 7 - 12 tahun) x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Kualitatif	(Jumlah siswa usia sekolah 13 - 15 tahun jenjang SMP/MTs / Jumlah Penduduk usia 13 - 15 tahun) x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring



No	Indikator Kinerja Utama	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1.12	Angka melanjutkan sekolah dari non formal ke SD	Kualitatif	(Jumlah siswa baru tingkat I di Jenjang Pendidikan SD/MI dibagi Jumlah lulusan di jenjang pendidikan non formal pada tahun ajaran sebelumnya) x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
1.13	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	Kualitatif	(Jumlah siswa baru tingkat I di Jenjang Pendidikan SMP/Mts dibagi Jumlah lulusan di jenjang pendidikan SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya) x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
2	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan				
2.1	Rasio Ruang Kelas Baik SD/MI	Kualitatif	(Jumlah Rombel SD/MI yang ada / jumlah Kelas yang ada) x 100	Data eksisting dan perhitungan penambahan jumlah koperasi	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
2.2	Rasio Ruang Kelas Baik SMP/MTS	Kualitatif	(Jumlah Rombel SMP/MTs yang ada / jumlah Kelas yang ada) x 100	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
2.3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar (SD)	Kualitatif	Jumlah Sekolah pada Pendidikan Dasar (SD) Dibanding Jumlah Penduduk Usia sekolah 7 - 12 tahun	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring



No	Indikator Kinerja Utama	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
2.4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah pertama (SMP)	Kualitatif	Jumlah Sekolah pada Pendidikan Dasar (SMP) Dibanding Jumlah Penduduk Usia sekolah 13 - 15 tahun	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
2.5	Rasio guru terhadap murid pada SD/MI	Kualitatif	Jumlah Guru SD/MI dibanding siswa SD/MI	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
2.6	Rasio guru terhadap murid pada SMP/MTs	Kualitatif	Jumlah Guru SMP/MTs dibanding siswa SMP/MTs	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
3	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 3 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik				
3.1	Presentase guru SD/MI yg memiliki kualifikasi D4/S1	Kualitatif	(Jumlah seluruh guru SD/MI yang memiliki kualifikasi D4-S1 / Jumlah seluruh guru SD/MI) x 100%	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
3.2	Presentase guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4/S1	Kualitatif	(Jumlah seluruh guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4-S1 / Jumlah seluruh guru SMP/MTs) x 100%	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring
3.3	Presentase guru yang	Kualitatif	(Jumlah seluruh guru SD/MI/SMP/MTs yang memiliki kualifikasi S2-S3 / Jumlah seluruh	Data eksisting	Recheck data dan



No	Indikator Kinerja Utama	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
	memiliki kualifikasi S2		$\text{guru SD/MI/SMP/MTs} \times 100\%$		perhitungan serta monitoring
3.4	Jumlah guru yang akan memperoleh sertifikasi profesi (kumulatif)	Kualitatif	$(\text{Jumlah seluruh guru yang memperoleh sertifikasi profesi (kumulatif)} / \text{Jumlah seluruh guru}) \times 100\%$	Data eksisting	Recheck data dan perhitungan serta monitoring

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{array}{c} \% \text{ capaian} \\ \text{kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(5)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.1	Angka Melek Huruf pada Usia 15 - 24 Tahun	%	100	99,98	99
		1.2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pendidikan Dasar	Tahun	8,60	8,07	94
		1.3	Angka lulusan (AL) SD/MI/PAKET A	%	100	100	100
		1.4	Angka lulusan (AL) SMP/MTs/PAKET B	%	100	100	100
		1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,35	99,28	100
		1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	97,40	97,33	98
		1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	42,80	54,11	128
		1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	115	111,20	98
		1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	%	107,50	80,98	76
		1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	103,90	99,07	97
		1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90,45	76,17	88
		1.12	Angka melanjutkan sekolah dari non formal ke SD	%	100	100	100
		1.13	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	99	100
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	2.1	Rasio Ruang Kelas Baik SD/MI	Rasio	25:1	1:26	96
		2.2	Rasio Ruang Kelas Baik SMP/MTs	Rasio	28:1	1:31	90
		2.3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia	Rasio	1:170	1:178,7	101

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(5)	(5)
			sekolah pada pendidikan dasar (SD)				
		2.4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah pertama (SMP)	Rasio	1:270	1:297,8	94
		2.5	Rasio guru terhadap murid pada SD/MI	Orang	1:18	1:18	100
		2.6	Rasio guru terhadap murid pada SMP/MTs	Orang	1:16	1:16	100
3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	3.1	Presentase guru SD/MI yg memiliki kualifikasi D4/S1	%	95	86	93
		3.2	Presentase guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4/S1	%	98	98	100
		3.3	Presentase guru yang memiliki kualifikasi S2	%	1,20	1,16	97
		3.4	Jumlah guru yang akan memperoleh sertifikasi profesi (komulatif)	Orang	2900	1776	98

Dari Tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 yang tingkat capaiannya melebihi target sebanyak 13 indikator dan yang tidak mencapai target sebanyak 12 indikator. Dengan rincian ada 23 (dua puluh tiga) indikator dengan capaian kategori sangat tinggi, 1 (satu) indikator dengan capaian kategori tinggi, 1 (satu) indikator dengan capaian kategori sedang. Artinya dapat dinyatakan bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 belum sepenuhnya tercapai.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja tahun 2025;
3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra;

Analisis merupakan bentuk pengeksplorasian data hasil pengukuran yang diperoleh, dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui beberapa hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klasifikasi dari munculnya data itu sendiri.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.4

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN / KONDISI TAHUN 2023	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA (%)	
					TARGET	REALISASI	PERSENTASE			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Angka Melek Huruf pada Usia 15 - 24 Tahun	%	99,98	100	99,98	99	99	99
		2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pendidikan Dasar	Tahun	8,07	8,60	8,07	94	9	89,7
		3	Angka lulusan (AL) SD/MI/PAKET A	%	100	100	100	100	100	100,0
		4	Angka lulusan (AL) SMP/MTs/PAKET B	%	100	100	100	100	100	100,0
		5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,28	99,35	99,28	100	0	99,3
		6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	97,33	97,40	97,33	98	0	97,3
		7	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	54,11	42,80	54,11	128	65	83,2
		8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	111,20	115	111,20	98	113	98,4
		9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	%	80,98	107,50	80,98	76	105,75	76,6
		10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,07	103,90	99,07	97	97	102,1
		11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	76,17	90,45	76,17	88	80	95,2
		12	Angka melanjutkan sekolah dari non formal ke SD	%	98	100	98	100	100	98,0



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN / KONDISI TAHUN 2023	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA (%)	
					TARGET	REALISASI	PERSENTASE			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
		13	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98	100	98	100	100	98,0
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1	Rasio Ruang Kelas Baik SD/MI	Rasio	1:25	25:1	1:26	96	1:25	96,2
		2	Rasio Ruang Kelas Baik SMP/MTs	Rasio	1:29	28:1	1:31	90	1:28	90,3
		3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar (SD)	Rasio	1:192	1:170	1:178,7	101	1:150	83,9
		4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah pertama (SMP)	Rasio	1:300	1:18	1:297,8	94	1:280	94,0
		5	Rasio guru terhadap murid pada SD/MI	Orang	1:17	1:16	1:18	100	1:16	94,1
		6	Rasio guru terhadap murid pada SMP/MTs	Orang	1:16	1:18	1:16	100	1:14	87,5
3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	1	Presentase guru SD/MI yg memiliki kualifikasi D4/S1	%	91,03	95	86	93	96	89,3
		2	Presentase guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4/S1	%	98,10	98	92	96	100	92,1
		3	Presentase guru yang memiliki kualifikasi S2	%	1,16	1,20	1,28	111	10,4	12,3
		4	Jumlah guru yang akan memperoleh sertifikasi profesi (komulatif)	Orang	1797	2900	1684	67	2160	78,0

Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, baik dari alokasi APBD maupun APBN, Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, khususnya target Kinerja Sasaran tahun 2025.

Untuk mempermudah pencapaian tujuan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara merumuskan sasaran strategis untuk masing-masing tujuan. Hasil **Capaian Kinerja 4 (Empat) Sasaran Strategis** Dinas pendidikan Kabupaten Batu Bara selama tahun 2023, sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1.1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan penting dari Dinas Pendidikan Kabupaten batu bara dan diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan baik jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah pertama. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Tahun 2025, berikut:

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Angka Melek Huruf pada Usia 15 - 24 Tahun	%	100	99,98	99
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pendidikan Dasar	Tahun	8,60	8,07	94
3	Angka lulusan (AL) SD/MI/PAKET A	%	100	100	100
4	Angka lulusan (AL) SMP/MTs/PAKET B	%	100	100	100
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,35	99,28	100
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	97,40	97,33	98
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	42,80	54,11	128
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	115	111,20	98

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	107,50	80,98	76
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	103,90	99,07	97
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90,45	76,17	88
12	Angka melanjutkan sekolah dari non formal ke SD	%	100	100	100
13	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	99	100
JUMLAH RATA-RATA					98,58
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA					SANGAT TINGGI

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Kinerja sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas pendidikan telah berjalan dengan baik. Dimana dari 13 Capaian Kinerja indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut diatas, tingkat capaian indikator kinerja yang telah memenuhi target tahun 2025 sebanyak 8 indikator kinerja. 5 indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terhadap capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang telah dicapai semakin ditingkatkan di masa mendatang. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target antara lain :

1. Belum tercapainya Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs dari yang ditetapkan 97,33% pada tahun 2025, tercapai 97,33% dengan nilai capaian 100%. Apabila dibandingkan di tahun 2024 yaitu sebesar 97,31 terjadi peningkatan sebesar 0,02%. Ini menunjukkan penduduk usia sekolah pada kelompok umur 13-15 tahun yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan sebesar 97,33%. Atau dalam kata lain 97,33% penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Batu Bara sedang bersekolah.
2. Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dari yang ditetapkan 114% pada tahun 2025, namun tercapai 111,20% dengan nilai capaian 98%. Apabila dibandingkan di tahun 2024 yaitu sebesar 113,70% terjadi penurunan sebesar 2,5%. Hal ini tidak berarti menurunnya tingkat Pendidikan disuatu daerah.

APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Dalam hal ini dapat diartikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2025 Kabupaten Batu Bara sebesar 111,20%, artinya persentase penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Batu Bara yang bersekolah di tingkat SD/MI/Paket A sekitar 111,20%.

3. Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B dari yang ditetapkan 107,16% pada tahun 2025, namun tercapai 80,98% dengan nilai capaian 76%. Apabila dibandingkan di tahun 2023 yaitu sebesar 83,57% terjadi penurunan sebesar 2,59%. Hal ini tidak berarti menurunnya tingkat Pendidikan disuatu daerah.

Dalam hal ini dapat diartikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2025 Kabupaten Batu Bara sebesar 80,98%, artinya persentase penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Batu Bara yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/SMPLB/ Paket B sekitar 80,98%.

4. Belum tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dari yang ditetapkan 103,81% pada tahun 2025, namun tercapai 99,07% dengan nilai capaian 97%. Apabila dibandingkan di tahun 2024 yaitu sebesar 99,26% terjadi penurunan sebesar 0,19%. Hal ini tidak berarti menurunnya tingkat Pendidikan disuatu daerah.

APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah

dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan

Dalam hal ini dapat diartikan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2025 Kabupaten Batu Bara sebesar 99,07%, artinya persentase penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Batu Bara yang bersekolah tepat waktu di jenjang SD/MI/Paket A sekitar 99,07%.

5. Belum tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dari yang ditetapkan 90,38% pada tahun 2025, namun tercapai 76,17% dengan nilai capaian 88%. Apabila dibandingkan di tahun 2024 yaitu sebesar 75,32% terjadi peningkatan sebesar 0,85%.

Dalam hal ini dapat diartikan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2025 Kabupaten Batu Bara sebesar 76,17%, artinya persentase penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Batu Bara yang bersekolah tepat waktu di jenjang SMP/MTs/SMPLB/ Paket B sekitar 76,17%.

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja tersebut, yang terealisasi dalam mendukung sasaran diatas berada dalam capaian rata-rata sebesar 98,36% sehingga dapat disimpulkan sasaran tersebut cukup tercapai/cukup berhasil dilaksanakan pada tahun 2025.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

2.1: Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan penting dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan baik jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Strategis
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Rasio Ruang Kelas Baik SD/MI	Rasio	25:1	1:26	96
2	Rasio Ruang Kelas Baik SMP/MTs	Rasio	28:1	1:31	90
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar (SD)	Rasio	1:170	1:178,7	101
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah pertama (SMP)	Rasio	1:270	1:297,8	115
5	Rasio guru terhadap murid pada SD/MI	Orang	1:18	1:18	100
6	Rasio guru terhadap murid pada SMP/MTs	Orang	1:16	1:16	100
JUMLAH RATA-RATA					97,85
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA					SANGAT TINGGI

Dari Tabel tersebut diatas, dapat di jelaskan bahwa dari Capaian Strategis 2.1 : Meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja, rata-rata capaian indikator **Sangat Tinggi**, namun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target, Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target capaian adalah :

1. Belum tercapainya Rasio Ruang Kelas Baik SD/MI, target yang ingin dicapai adalah 1:25, dimana capaiannya masih 1:26 pada tahun 2025. Namun sebagaimana standar pelayanan minimal pendidikan yang diharapkan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yaitu untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dalam 1 (satu) ruang kelas atau rombel. Dari capaian tersebut rata-rata jumlah siswa sebanyak 26 orang siswa dalam 1 (satu) ruang kelas atau rombel.
2. Belum tercapainya Rasio Ruang Kelas Baik SMP/MTs, target yang ingin dicapai adalah 1:28, dimana capaiannya masih 1:31 pada tahun 2025. Namun sebagaimana standar pelayanan minimal pendidikan yang diharapkan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yaitu untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang dalam 1 (satu) ruang kelas atau rombel. Dari capaian tersebut rata-

rata jumlah siswa sebanyak 31 orang siswa dalam 1 (satu) ruang kelas atau rombel.

3. Belum tercapainya Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah pertama (SMP), target yang ingin dicapai adalah 1:270, dimana capaiannya masih 1:297,8 pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut kedepan Dinas Pendidikan akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang telah dicapai semakin ditingkatkan di masa mendatang.

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian indikator kinerja pada capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang teralisir dalam mendukung sasaran srategis diatas berada dalam capaian rata-rata sebesar 97,85%, sehingga dapat dikatakan sasaran tersebut cukup tercapai/cukup berhasil dilaksanakan pada tahun 2025.

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.1: Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik

Sasaran strategis ini merupakan salah satu kebijakan penting dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan diarahkan untuk peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan baik jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah pertama. Ketercapaian kinerja sasaran strategis ini diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara Tahun 2021, berikut :

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Presentase guru SD/MI yg memiliki kualifikasi D4/S1	%	95	86	93
2	Presentase guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4/S1	%	98	98	96
3	Presentase guru yang memiliki kualifikasi S2	%	1,20	1,16	111
4	Jumlah guru yang akan memperoleh sertifikasi profesi (komulatif)	Orang	2900	1776	98
JUMLAH RATA-RATA					91,85
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA					SANGAT TINGGI

Dari Tabel tersebut diatas, dapat di jelaskan bahwa dari Capaian Strategis 3.7: Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, capaian indikator yang belum memenuhi target tahun 2025 adalah sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, sedangkan yang telah memenuhi target adalah sebanyak 1 (satu) indikator kinerja. Terhadap capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara akan tetap melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang telah dicapai semakin ditingkatkan di masa mendatang. Adapun indikator kinerja yang belum memenuhi target capaian adalah :

- a. Belum tercapainya Presentase guru SD/MI yg memiliki kualifikasi D4/S1, target yang ingin dicapai adalah 92%, dimana capaiannya masih 85,74% pada tahun 2025. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan guru dengan kualifikasi D4/S1 adalah mewajibkan tenaga pendidik di jenjang SD/MI berpendidikan D4/S1 sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Pasal 30 Ayat 4 Huruf a. Berikut tabel jumlah guru dan jumlah guru yang berpendidikan D4/S1 jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

Tabel 3.8

Presentase guru SD/MI yang memiliki kualifikasi D4/S1

No	Jumlah Guru SD/MI	Jumlah Guru Pendidikan D4/S.1	Persentase
1	2421	2327	90,74%

- b. Tercapainya Presentase guru SMP/MTs yg memiliki kualifikasi D4/S1, target yang ingin dicapai adalah 100% pada tahun 2024. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan guru dengan kualifikasi D4/S1 adalah mewajibkan tenaga pendidik di jenjang SMP/MTs berpendidikan D4/S1 sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Pasal 32 Ayat 4 Huruf a. Berikut tabel jumlah guru dan jumlah guru yang berpendidikan D4/S1 jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.

Tabel 3.9

Presentase guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4/S1

No	Jumlah Guru SMP/MTs	Jumlah Guru Pendidikan D4/S.1	Persentase
1	967	967	100%

- c. Belum tercapainya jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik yang ditetapkan sebesar 2.900 orang, dimana capaiannya masih sebesar 1.684 pada tahun 2025. Untuk meningkatkan capaian angka tersebut diatas pada masa mendatang, maka upaya yang akan dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Batu Bara antara lain adalah Peningkatan Fasilitasi bagi guru-guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik melalui optimalisasi pendataan pendidik yang ada pada Dapodik.

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian indikator kinerja pada capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang teralir dalam mendukung sasaran srategis diatas berada dalam capaian rata-rata sebesar 91,85%, sehingga dapat dikatakan sasaran tersebut cukup tercapai/cukup berhasil dilaksanakan pada tahun 2025.

3.2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dianggarkan sebesar Rp. 375.007.353.146,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 367.859.178.385,00 atau mencapai 98,09%.

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat diuraikan melalui tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	227.124.207.056,00	216.121.460.887,00	95,16
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.024.725,00	18.624.725,00	92,73
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.994.975,00	12.494.975,00	56,81
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.029.750,00	6.129.750,00	61,12
5		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	225.049.402.001,00	214.411.610.409,00	95,27
6		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	225.039.909.501,00	214.408.117.909,00	95,28
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.492.500,00	3.492.500,00	36,79
9		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	269.732.500,00	100.529.780,00	37,27
10		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
11		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	26.040.000,00	65,10
12		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	119.732.500,00	74.489.780,00	62,21
13		Administrasi Umum Perangkat Daerah	442.198.230,00	372.049.115,00	84,14
14		Penyediaan Komponen	17.693.591,00	17.685.100,00	99,95



No	Sasaran	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.579.839,00	111.204.800,00	68,82
15		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.825.000,00	31.625.000,00	63,47
16		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.800,00	19.955.800,00	99,78
17		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
18		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.100.000,00	137.578.415,00	98,91
19		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.500.000,00	162.460.000,00	98,76
20		Pengadaan Mebel	52.500.000,00	51.690.000,00	98,46
21		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.000.000,00	110.770.000,00	98,90
22		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.779.600,00	486.464.948,00	87,69
24		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.219.600,00	54.904.948,00	56,48
25		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.560.000,00	431.560.000,00	94,32
26		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.570.000,00	248.721.910,00	46,56
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.480.000,00	61.499.000,00	83,69
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.090.000,00	186.419.910,00	58,61
28		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	36.803.000,00	81,78
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00
30		Program Pengelolaan Pendidikan	115.083.277.063,00	112.587.617.654,00	97,83



No	Sasaran	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
31		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	65.432.610.377,00	21.588.089.341,00	32,99
32	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.012.868.765,00	1.990.661.217,00	98,90
33		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	425.600.000,00	399.403.406,00	93,84
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	689.224.000,00	686.739.967,00	99,64
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.522.150.000,00	1.398.172.476,00	91,86
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.858.257.560,00	2.843.055.403,00	99,47
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.352.166.800,00	6.281.261.374,00	98,88
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	612.000.000,00	610.070.626,00	99,68
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	392.820.000,00	273.393.233,00	69,60
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	812.405.000,00	798.769.149,00	98,32
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	176.800.000,00	176.186.644,00	99,65
		Pengadaan Mebel Sekolah	1.997.150.000,00	1.969.594.550,00	98,62
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	750.000.000,00	749.850.000,00	99,98
34	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.882.279.200,00	3.326.815.296,00	85,69
40	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	336.300.000,00	84.116.000,00	25,01
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	157.599.040,0	150.898.958,0	95,75
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.612.589.052,00	42.612.589.052,00	100,00
41		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	33.491.726.084,00	32.927.230.729,00	98,31



No	Sasaran	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
42	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	807.196.250,00	793.991.577,00	98,36
43		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	379.000.000,00	372.016.866,00	98,16
44		Pembangunan Laboratorium	1.496.800.000,00	1.482.216.887,00	99,03
45		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	446.640.000,00	445.686.252,00	99,79
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.163.778.000,00	4.095.588.803,00	98,36
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.071.260.000,00	2.984.453.612,00	97,17
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	107.980.000,00	107.648.814,00	99,69
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	204.780.000,00	199.761.348,00	97,55
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	421.488.750,00	420.077.660,00	99,67
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	243.920.000,00	243.522.428,00	99,84
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	290.000.000,00	283.975.000,00	97,92
		Pengadaan Mebel Sekolah	1.098.140.000,00	1.070.320.550,00	97,47
46	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	775.297.640,00	559.132.516,00	72,12
47		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	73.757.000,00	49.080.672,00	66,54
48	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.204.100.000,00	1.112.169.300,00	92,37
49	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	18.707.588.444,00	18.707.588.444,00	100,00
50		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.557.340.602,00	12.884.708.532,00	95,04
51	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.356.376.902,00	1.331.552.553,00	98,17



No	Sasaran	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.241.570.000,00	3.226.909.718,00	99,55
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	118.958.400,00	113.824.149,00	95,68
		Pengadaan Mebel PAUD	151.385.800,00	151.193.600,00	99,87
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	608.000.000,00	601.690.000,00	98,96
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	48.419.500,00	47.200.000,00	97,48
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.259.000.000,00	1.759.900.000,00	77,91
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	867.430.000,00	746.238.512,00	86,03
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.906.200.000,00	4.906.200.000,00	100,00
52		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.301.600.000,00	2.300.000.000,00	99,93
53	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	100,00
54	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	234.400.000,00	232.800.000,0	99,32
56	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	927.200.000,00	927.200.000,00	100,00
57	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000,00	275.000.000,00	91,67
58		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	300.000.000,00	275.000.000,00	91,67
59		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	300.000.000,00	275.000.000,00	91,67



No	Sasaran	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
		Nonformal/Kesetaraan			
		JUMLAH	375.007.353.146,00	367.859.178.385,00	98,09

Untuk mengetahui efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Sasaran 1* : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tabel 3.12

Efektifitas Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran 1 :

No	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	227.124.207.056,00	216.121.460.887,00	95,16
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.024.725,00	18.624.725,00	92,73
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.994.975,00	12.494.975,00	56,81
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.029.750,00	6.129.750,00	61,12
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	225.049.402.001,00	214.411.610.409,00	95,27
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	225.039.909.501,00	214.408.117.909,00	95,28
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.492.500,00	3.492.500,00	36,79
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	269.732.500,00	210.529.780,00	78,05
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	26.040.000,00	65,10
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	119.732.500,00	74.489.780,00	62,21
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	442.198.230,00	372.049.115,00	84,14



No	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.693.591,00	17.685.100,00	99,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.579.839,00	111.204.800,00	68,82
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.825.000,00	31.625.000,00	63,47
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.800,00	19.955.800,00	99,78
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.100.000,00	137.578.415,00	98,91
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.500.000,00	162.460.000,00	98,76
20	Pengadaan Mebel	52.500.000,00	51.690.000,00	98,46
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.000.000,00	110.770.000,00	98,90
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.779.600,00	486.464.948,00	87,69
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.219.600,00	54.904.948,00	56,48
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.560.000,00	431.560.000,00	94,32
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.570.000,00	459.721.910,00	75,17
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.480.000,00	61.499.000,00	83,69
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.090.000,00	186.419.910,00	58,61
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	36.803.000,00	81,78
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00
30	Program Pengelolaan Pendidikan	70.503.961.176,00	69.883.044.154,00	99,12
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	43.106.488.092,00	42.847.604.010,00	99,40



No	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
32	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	336.300.000,00	84.116.000,00	25,01
33	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	157.599.040,0	150.898.958,0	95,75
34	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.612.589.052,00	42.612.589.052,00	100,00
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.556.643.084,00	19.315.801.632,00	98,77
36	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	775.297.640,00	559.132.516,00	72,12
37	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	73.757.000,00	49.080.672,00	66,54
38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	18.707.588.444,00	18.707.588.444,00	100,00
39	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.773.630.000,00	5.652.438.512,00	97,90
40	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	867.430.000,00	746.238.512,00	86,03
41	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.906.200.000,00	4.906.200.000,00	100,00
42	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.067.200.000,00	2.067.200.000,00	100,00
43	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	100,00
44	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	927.200.000,00	927.200.000,00	100,00
	JUMLAH	375.007.353.146,00	367.859.178.385,00	98,09

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan realisasi anggaran sebesar 98,09%, diperoleh capaian kinerja untuk sasaran 1 sebesar 98,09%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut telah efektif.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Tabel 3.13

Efektifitas Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran 2

No	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Pendidikan	34.844.266.962,00	34.158.126.645,00	98,03
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	16.588.573.360,00	16.186.496.828,00	97,58
3	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.012.868.765,00	1.990.661.217,00	98,90
4	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	425.600.000,00	399.403.406,00	93,84
5	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	689.224.000,00	686.739.967,00	99,64
6	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
7	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.522.150.000,00	1.398.172.476,00	91,86
8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.858.257.560,00	2.843.055.403,00	99,47
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.352.166.800,00	6.281.261.374,00	98,88
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	612.000.000,00	610.070.626,00	99,68
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	392.820.000,00	273.393.233,00	69,60
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	812.405.000,00	798.769.149,00	98,32
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	176.800.000,00	176.186.644,00	99,65
14	Pengadaan Mebel Sekolah	1.997.150.000,00	1.969.594.550,00	98,62
15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	750.000.000,00	749.850.000,00	99,98
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.730.983.000,00	12.499.259.797,00	98,18
9	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	807.196.250,00	793.991.577,00	98,36
10	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	379.000.000,00	372.016.866,00	98,16



No	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
11	Pembangunan Laboratorium	1.496.800.000,00	1.482.216.887,00	99,03
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	446.640.000,00	445.686.252,00	99,79
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.163.778.000,00	4.095.588.803,00	98,36
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.071.260.000,00	2.984.453.612,00	97,17
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	107.980.000,00	107.648.814,00	99,69
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	204.780.000,00	199.761.348,00	97,55
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	421.488.750,00	420.077.660,00	99,67
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	243.920.000,00	243.522.428,00	99,84
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	290.000.000,00	283.975.000,00	97,92
	Pengadaan Mebel Sekolah	1.098.140.000,00	1.070.320.550,00	97,47
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	5.524.710.602,00	5.472.370.020,00	99,05
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.356.376.902,00	1.331.552.553,00	98,17
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.241.570.000,00	3.226.909.718,00	99,55
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	118.958.400,00	113.824.149,00	95,68
	Pengadaan Mebel PAUD	151.385.800,00	151.193.600,00	99,87
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	608.000.000,00	601.690.000,00	98,96
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	48.419.500,00	47.200.000,00	97,48
	JUMLAH	34.844.266.962,00	34.158.126.645,00	98,03

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan realisasi anggaran sebesar 98,03%, diperoleh capaian kinerja untuk sasaran 2 sebesar 97,85%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut telah

efektif. Walaupun terlihat dari perbandingan persentase realisasi anggaran lebih besar dari capaian kinerja namun selisih realisasi dan capaian kinerja tidak terlalu jauh.

c. Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik

Tabel 3.14

Efektifitas Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran 3

No	Uraian Program / Kegiatan Bidang Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Pendidikan	7.879.779.200,00	6.706.684.596,00	85,11
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3.882.279.200,00	3.326.815.296,00	85,69
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.882.279.200,00	3.326.815.296,00	85,69
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.204.100.000,00	1.112.169.300,00	92,37
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.204.100.000,00	1.112.169.300,00	92,37
6	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	2.259.000.000,00	1.759.900.000,00	77,91
7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.259.000.000,00	1.759.900.000,00	77,91
8	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	234.400.000,00	232.800.000,00	99,32
9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	234.400.000,00	232.800.000,00	99,32
10	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000,00	275.000.000,00	91,67
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	300.000.000,00	275.000.000,00	91,67
12	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	300.000.000,00	275.000.000,00	91,67
	JUMLAH	7.879.779.200,00	6.706.684.596,00	85,11



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan realisasi anggaran sebesar 85,11%, diperoleh capaian kinerja untuk sasaran 3 sebesar 91,85%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut telah efektif. Hal ini terlihat dari perbandingan persentase realisasi anggaran lebih kecil dari capaian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2025. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Bupati Batu Bara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban.

Dalam pencapaian sasaran mikro, dari 25 sasaran Strategis yang ditetapkan, telah dilaksanakan 25 sasaran, namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran telah berhasil diwujudkan secara optimal. Kekurang berhasil dari beberapa sasaran lebih disebabkan adanya perubahan kondisi di lapangan dari kondisi yang telah diperhitungkan dalam proses perencanaan.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat *outcome*. Penyebabnya adalah organisasi belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Organisasi Telah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran tanpa membedakan jenis belanja yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Hal ini disebabkan sistem keuangan yang digunakan pada Dinas Pendidikan Kab Batu Bara telah mengacu pada sistem keuangan yang berbasis kinerja.



Kami menyadari dalam penyajian Laporan Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara masih banyak kekurangan kami mengucapkan terima kasih apabila dalam penyajian ini mendapatkan banyak informasi dan masukan dari berbagai pihak.

Perupuk, Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batu Bara

WALI WALA AZAHARI SAGALA, S. Pd, M.H
Pembina
NIP. 19770415 201001 1 013